

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD. RKA-PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD. Dengan demikian apabila terjadi perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen tersebut secara otomatis harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap PPAS tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 154 dan 155 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan PPAS digunakan sebagai dasar melakukan perubahan APBD.

Pada Pasal 154 Permendagri 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan *saldo anggaran lebih* tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan atau ditambahkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang telah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD harus

dituangkan masing-masing dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan, untuk kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (RKPA-PD) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan**

1. Menyesuaikan perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2017 yang disinkronkan dengan perubahan kebijakan sesuai kondisi tahun berjalan;
2. Menyesuaikan plafon anggaran belanja daerah tahun 2017 berdasarkan prioritas pembangunan yang harus dicapai;
3. Pedoman untuk melakukan koreksi terhadap target capaian dan alokasi anggaran per Perangkat Daerah;
4. Menyesuaikan kebijakan pembiayaan daerah untuk mensinkronkan surplus atau defisit guna menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah;
5. Menetapkan plafon anggaran sementara terhadap perubahan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA);
6. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (RKPA – PD); dan
7. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2017.

### **1.3 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).

#### 1.4. Sistematika

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan:**

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2017.

**Bab II Rencana Perubahan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah**

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2017.
- b. Perubahan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

**Bab III Perubahan Belanja Daerah**

Menguraikan perubahan Belanja Daerah, meliputi kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung dan target pembangunan tahun 2017.

**Bab IV Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara**

Menguraikan perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan PD serta memuat matriks prioritas program dan plafon anggaran

**Bab V Penutup**

**BAB II****RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN****2.1 Rencana Perubahan Pendapatan**

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2017, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2017 mempertimbangkan:
  - a) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
  - b) Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2017;
  - c) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.
2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2017 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 9 persen dimana semula diperkirakan sebesar Rp 678.913.155.746,16 meningkat menjadi Rp737.192.092.935,16 atau bertambah sebesar Rp58.278.937.189,00. hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan terhadap pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp21.038.468.100,00 atau 4 persen. Dari semula diperkirakan sebesar Rp557.198.594.109,57 meningkat menjadi Rp 578.237.062.209,57;
2. Dana Perimbangan tidak mengalami perubahan sebesar Rp1.666.665.913.570,00 hal ini disebabkan karena tidak ada kenaikan dalam Belanja Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Pendapatan Lainnya (sumbangan pihak ketiga) mengalami kenaikan sebesar 200 persen atau Rp20.000.000.000,00 dimana semula sebesar Rp10.000.000.000 meningkat menjadi sebesar Rp30.000.000.000,00 dari. Meningkatnya alokasi pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini

disebabkan karena Kebijakan Pemerintah yang ingin meningkatkan sumber pendapatan melalui CSR atau pihak ketiga.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 3,32 persen atau bertambah sebesar Rp78.278.937.189,00. dari semula sebesar Rp2.355.579.069.316,16 menjadi Rp2.433.858.006.505,16

Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel II.7.



Tabel II.7

## Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	APBD 2017	PPAS-P 2017	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4-3)	(6=5/3*100)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>678.913.155.746,16</b>	<b>737.192.092.935,16</b>	<b>58.278.937.189,00</b>	<b>8,58%</b>
1.1.1	Pajak daerah	557.198.594.109,57	578.237.062.209,57	21.038.468.100,00	3,78%
1.1.2	Retribusi Daerah	15.448.205.014,87	19.409.736.914,87	3.961.531.900,00	25,64%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00%
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	97.766.356.621,72	131.045.293.810,72	33.278.937.189,00	34,04%
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>1.666.665.913.570,00</b>	<b>1.666.665.913.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	175.828.126.000,00	175.828.126.000,00	0,00	0,00%
1.2.2	Dana alokasi umum	1.035.119.230.570,00	1.035.119.230.570,00	0,00	0,00%
1.2.3	Dana alokasi khusus	455.718.557.000,00	455.718.557.000,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>200%</b>
1.3.5	Pendapatan Lainnya (sumbangan pihak ketiga)	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	<b>20.000.000.000,00</b>	200%
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.355.579.069.316,16</b>	<b>2.433.858.006.505,16</b>	<b>78.278.937.189,00</b>	<b>3,32%</b>



## 2.2 Rencana Perubahan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tidak tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp 315.544.385.627,95 terealisasi sebesar Rp 217.692.026.730,06 dengan kata lain menurun sebesar Rp 97.852.358.897,89 atau 31,01 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.2



**Tabel II.2**  
**Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2017**

NO	Uraian	APBD 2017	PPAS-P 2017	Bertambah/(Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>315.544.385.627,95</b>	<b>217.692.026.730,06</b>	<b>(97.852.358.897,89)</b>	<b>-31,01%</b>
3.1.1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	315.544.385.627,95	217.692.026.730,06	(97.852.358.897,98)	-31,01%
3.1.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.1.3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00%
3.1.4	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00%
3.1.5	Pembiayaan Neto	310.544.385.627,95	212.692.026.730,06	(97.852.358.897,89)	-31,51%
	<b>DEFISIT ANGGARAN UNTUK P-APBD TA.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### BAB III

## PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Pertengahan tahun 2017 merupakan akhir dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017, sehingga tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diusung pada tahun 2017 masih menggunakan RPJMD tersebut yaitu *“Mewujudkan kemandirian, kemajuan, keadilan, daya saing dan pemerataan pembangunan antardaerah, antarkawasan pedesaan dan perkotaan”*

Sebagai upaya untuk memantapkan arah dan tujuan pembangunan pada Tahun 2017 diidentifikasi terdapat prioritas lainnya yang menjadi permasalahan dan perlu dilaksanakan yaitu;

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. percepatan pembangunan daerah;
3. iklim investasi yang kondusif;
4. keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah dan negara; serta,
5. pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran ini disusun dengan memperhatikan Sasaran/arah kebijakan Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, serta Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Terpilih periode 2017-2022.

Adapun Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Terpilih periode 2017-2022 yang menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran ini adalah sebagai berikut:

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022, yaitu:

***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.***

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Prioritas program dalam perubahan RKPD tahun 2017 ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- 2) Memiliki korelasi terhadap pencapaian sasaran/arah kebijakan RPJPD 2005-2025;
- 3) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2017;
- 4) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 5) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 6) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2017 tetap mengacu pada arah kebijakan Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 dan memperhatikan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih periode 2017-2022.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, yaitu :

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik;
4. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat;
5. Pembangunan Berdemokrasi;
6. Penanggulangan Bencana

Tema dan prioritas pembangunan 2017 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan 2017 sebagaimana disajikan pada Tabel II.7.

Tabel II.7

## Realisasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2017

No	Indikator	RKPD	Perubahan RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,6
2	PDRB per kapita (Rpjuta)	50.762.940	50.584.582
3	Inflasi(%)	6,75	5,65
4	Pengangguran (%)	5,1	5,1
5	Kemiskinan (%)	4,53	4,53

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017 (diolah)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 dan dengan memperhatikan beberapa dinamika pembangunan yang terjadi saat ini, antara lain terjadinya bencana alam banjir yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perubahan asumsi perekonomian makro daerah, proyeksi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, memperhatikan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Terpilih periode 2017-2022, serta diperlukan keselarasan sasaran/arah kebijakan Perubahan RPJPD 2005-2025 dan RPJMN, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penting untuk melakukan perubahan terhadap dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017.

### 1) Belanja Tidak Langsung

#### a) Belanja Pegawai

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2017. Belanja pegawai pada tahun 2017 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp41.034.535.741,09 atau 5,77 persen. Semula berjumlah Rp710.654.094.090,45 menjadi Rp669.619.558.349,36;

#### b) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Terjadinya penurunan belanja hibah pada perubahan kebijakan umum anggaran dianggarkan sebesar Rp42.225.000.000,00 atau 13,56 persen. Dari semula berjumlah Rp311.439.900.000,00 menjadi Rp269.241.900.000,00. Berkurangnya belanja hibah ini antara lain

disebabkan oleh pengalihan belanja BOS Pusat bidang pendidikan ke belanja langsung dinas pendidikan, selanjutnya mengakomodir persiapan sebagai tuan rumah PON XXI 2024 dan bantuan hibah.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial. Terjadinya bencana banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat penganggaran belanja tidak terduga dianggarkan meningkat sebesar Rp 2.000.000.000,00 menjadi Rp7.297.043.000,00 atau 37,76%.

**a. Belanja Langsung**

Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2017 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyesuaian/rasionalisasi alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;
- c. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku;
- d. Mengakomodasi penganggaran terhadap beberapa belanja yang mendesak dan harus dilaksanakan dan belum dianggarkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2017, seperti: program kegiatan penanganan pasca banjir dan program kegiatan unggulan yang diselaraskan dengan visi misi kepala daerah terpilih tahun 2017-2022;
- e. Mengakomodasi kurang bayar/hutang daerah pada beberapa kegiatan TA 2017;
- f. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2017 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami *force majeure*;
- g. Belanja Pegawai
  - (1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas

efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2017 yang berlaku.

- (2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.

#### h. Belanja Barang dan Jasa

- (1) Diarahkan sebagai upaya untuk menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Belanja barang dan jasa di setiap Perangkat Daerah digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan.
- (3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2016.
- (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.

#### i. Belanja Modal

- (1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal.
- (2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut.
- (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.
- (4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disajikan pada Tabel II.8.



**Tabel II.8**  
**Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2017**

NO	URAIAN	APBD 2017	PPAS-P 2017	BERTAMBAH/(BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.489.821.437.602,11</b>	<b>1.426.029.877.299,96</b>	<b>(63.791.560.302,15)</b>	<b>-4,41%</b>
1.	Belanja Pegawai	710.654.094.090,45	669.619.558.349,36	(41.034.535.741,09)	-5,77%
2.	Belanja Hibah	311.439.900.000,00	269.214.900.000,00	(42.225.000.000,00)	-13,56%
3.	Belanja Bantuan Sosial	943.000.000,00	943.000.000,00	0,00	0,00%
4.	Belanja Bagi Hasil kepada kab/ kota dan pemdes	344.731.977.987,66	362.199.953.426,60	17.467.975.438,94	5,07%
5	Belanja Bankeu kepada kab/ kota dan pemdes	116.755.422.524,00	116.755.422.524,00	0,00	0,00%
6	Belanja Tidak Terduga	5.297.043.000,00	7.297.043.000,00	2.000.000.000,00	37,76%
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.176.302.017.342,00</b>	<b>1.220.520.155.935,26</b>	<b>44.218.138.593,26</b>	<b>3,76%</b>
1.	Belanja Pegawai	148.234.645.800,00	153.181.932.800,00	4.947.287.000,00	3,02%
2.	Belanja Barang dan Jasa	579.449.189.781,00	606.310.802.614,00	12.324.612.833,00	4,58%
3.	Belanja Modal	448.618.181.761,00	461.027.420.521,26	12.409.238.760,26	2,63%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.666.123.454.944,11</b>	<b>2.646.550.033.235,22</b>	<b>(19.573.421.708,89)</b>	<b>-0,73%</b>



## **BAB IV**

### **PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

---

Perubahan Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (RKPA – PD) Tahun Anggaran 2017.

Substansi dokumen PPAS didasarkan pada Perubahan RKPD dan KUPA Tahun 2017 yang dikelompokkan menurut belanja tidak langsung, berdasarkan urusan pemerintahan serta perubahan plafon anggaran PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas.

#### **4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan tahun 2017 dapat disajikan pada Tabel IV.1 sebagai berikut.



**Tabel IV.1**  
**Perubahan Plafon Anggaran Sementara**  
**Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2017**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG		JUMLAH (BTL+BL)	
		APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>377.258.358.184,82</b>	<b>356.080.084.656,08</b>	<b>725.311.565.440,00</b>	<b>736.314.330.645,00</b>	<b>1.102.569.923.624,82</b>	<b>1.092.394.415.301,08</b>
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>254.713.895.218,95</b>	<b>237.826.631.204,63</b>	<b>196.039.176.500,00</b>	<b>239.870.847.900,00</b>	<b>450.753.071.718,95</b>	<b>477.697.479.104,63</b>
a	Dinas Pendidikan	254.713.895.218,95	237.826.631.204,63	195.705.086.500,00	239.536.757.900,00	450.418.981.718,95	477.363.389.104,63
b	Sekretariat Daerah (Biro Kesra)			334.090.000,00	334.090.000,00	334.090.000,00	334.090.000,00
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>70.180.267.355,90</b>	<b>68.120.903.476,90</b>	<b>181.305.677.750,00</b>	<b>176.739.608.047,00</b>	<b>251.485.945.105,90</b>	<b>244.860.511.523,90</b>
a	Dinas Kesehatan	13.759.247.062,00	13.080.362.278,00	37.328.632.300,00	34.992.002.337,00	51.087.879.362,00	48.072.364.615,00
a	Rumah Sakit Umum Provinsi	28.299.527.620,00	29.436.148.310,00	110.821.800.950,00	112.163.469.260,00	139.121.328.570,00	141.599.617.570,00
a	Rumah Sakit Jiwa Daerah	28.121.492.673,90	25.604.392.888,90	33.155.244.500,00	29.584.136.450,00	61.276.737.173,90	55.188.529.338,90
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>16.316.988.313,00</b>	<b>16.827.663.633,00</b>	<b>291.345.413.250,00</b>	<b>272.305.828.981,00</b>	<b>307.662.401.563,00</b>	<b>289.133.492.614,00</b>
a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.316.988.313,00	16.827.663.633,00	291.345.413.250,00	272.305.828.981,00	307.662.401.563,00	289.133.492.614,00
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>5.915.098.000,00</b>	<b>5.120.030.554,52</b>	<b>12.481.785.000,00</b>	<b>10.139.790.000,00</b>	<b>18.396.883.000,00</b>	<b>15.259.820.554,52</b>
a	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.915.098.000,00	5.120.030.554,52	12.481.785.000,00	10.139.790.000,00	18.396.883.000,00	15.259.820.554,52
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>15.485.478.363,97</b>	<b>14.582.218.451,11</b>	<b>18.653.662.690,00</b>	<b>16.585.165.180,00</b>	<b>34.139.141.053,97</b>	<b>31.167.383.631,11</b>
a	Kesatuan Bangsa dan	5.475.416.309,97	5.036.794.397,11	5.357.828.730,00	4.570.291.630,00	10.833.245.039,97	9.607.086.027,11



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG		JUMLAH (BTL+BL)	
		APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Politik						
c	Satuan Polisi Pamong Praja	10.010.062.054,00	9.545.424.054,00	13.295.833.960,00	12.014.873.550,00	23.305.896.014,00	21.560.297.604,00
<b>6</b>	<b>Sosial</b>	<b>14.646.630.933,00</b>	<b>13.602.637.335,92</b>	<b>25.485.850.250,00</b>	<b>20.673.090.537,00</b>	<b>40.132.481.183,00</b>	<b>34.275.727.872,92</b>
a	Dinas Sosial	10.061.116.560,00	9.399.170.974,92	14.248.804.450,00	12.277.483.737,00	24.309.921.010,00	21.676.654.711,92
b	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.585.514.373,00	4.203.466.361,00	11.237.045.800,00	8.395.606.800,00	15.822.560.173,00	12.599.073.161,00
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar</b>	<b>85.772.744.558,34</b>	<b>79.779.989.950,25</b>	<b>146.945.267.150,00</b>	<b>133.564.985.065,26</b>	<b>232.718.011.708,34</b>	<b>213.344.975.015,51</b>
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>15.762.254.200,00</b>	<b>13.788.514.087,00</b>	<b>10.311.581.400,00</b>	<b>9.519.794.800,00</b>	<b>26.073.835.600,00</b>	<b>23.308.308.887,00</b>
a	Dinas Tenaga Kerja	15.762.254.200,00	13.788.514.087,00	10.311.581.400,00	9.519.794.800,00	26.073.835.600,00	23.308.308.887,00
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>6.141.827.458,00</b>	<b>5.515.485.443,00</b>	<b>4.594.623.000,00</b>	<b>4.054.838.000,00</b>	<b>10.736.450.458,00</b>	<b>9.570.323.443,00</b>
a	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	6.141.827.458,00	5.515.485.443,00	4.594.623.000,00	4.054.838.000,00	10.736.450.458,00	9.570.323.443,00
<b>3</b>	<b>Pangan</b>	<b>5.011.385.318,34</b>	<b>4.480.245.312,14</b>	<b>5.062.044.000,00</b>	<b>4.992.738.400,00</b>	<b>10.073.429.318,34</b>	<b>9.472.983.712,14</b>
a	Dinas Pangan	5.011.385.318,34	4.480.245.312,14	5.062.044.000,00	4.992.738.400,00	10.073.429.318,34	9.472.983.712,14
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>	-	-	<b>14.045.241.450,00</b>	<b>14.045.241.450,00</b>	<b>14.045.241.450,00</b>	<b>14.045.241.450,00</b>
a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			14.045.241.450,00	14.045.241.450,00	14.045.241.450,00	14.045.241.450,00
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>7.628.699.044,00</b>	<b>7.431.859.812,00</b>	<b>5.234.690.250,00</b>	<b>5.425.052.250,00</b>	<b>12.863.389.294,00</b>	<b>12.856.912.062,00</b>
a	Dinas Lingkungan Hidup	7.628.699.044,00	7.431.859.812,00	5.234.690.250,00	5.425.052.250,00	12.863.389.294,00	12.856.912.062,00



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG		JUMLAH (BTL+BL)	
		APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	-	-	<b>1.858.910.000,00</b>	<b>1.614.130.400,00</b>	<b>1.858.910.000,00</b>	<b>1.614.130.400,00</b>
a	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana			1.858.910.000,00	1.614.130.400,00	1.858.910.000,00	1.614.130.400,00
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>6.869.770.039,55</b>	<b>5.440.309.318,00</b>	<b>20.651.352.850,00</b>	<b>21.068.504.100,00</b>	<b>27.521.122.889,55</b>	<b>26.508.813.418,00</b>
a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.869.770.039,55	5.440.309.318,00	20.651.352.850,00	21.068.504.100,00	27.521.122.889,55	26.508.813.418,00
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	-	-	<b>710.015.000,00</b>	<b>575.315.000,00</b>	<b>710.015.000,00</b>	<b>575.315.000,00</b>
a	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana			710.015.000,00	575.315.000,00	710.015.000,00	575.315.000,00
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>6.533.360.754,00</b>	<b>6.213.740.489,00</b>	<b>30.420.489.000,00</b>	<b>24.986.315.363,26</b>	<b>36.953.849.754,00</b>	<b>31.200.055.852,26</b>
a	Dinas Perhubungan	6.533.360.754,00	6.213.740.489,00	30.420.489.000,00	24.986.315.363,26	36.953.849.754,00	31.200.055.852,26
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.579.362.257,00</b>	<b>6.637.155.057,00</b>	<b>9.435.106.800,00</b>	<b>9.616.662.800,00</b>	<b>16.014.469.057,00</b>	<b>16.253.817.857,00</b>
a	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.579.362.257,00	6.637.155.057,00	9.435.106.800,00	9.616.662.800,00	16.014.469.057,00	16.253.817.857,00
b	Sekretariat Daerah (Biro Kesra)						



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG		JUMLAH (BTL+BL)	
		APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
c	Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)						
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>5.837.517.611,85</b>	<b>5.748.138.864,00</b>	<b>7.760.720.600,00</b>	<b>8.143.084.600,00</b>	<b>13.598.238.211,85</b>	<b>13.891.223.464,00</b>
a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.837.517.611,85	5.748.138.864,00	7.760.720.600,00	8.143.084.600,00	13.598.238.211,85	13.891.223.464,00
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>5.638.130.959,00</b>	<b>5.519.940.959,00</b>	<b>6.243.334.000,00</b>	<b>2.985.789.950,00</b>	<b>11.881.464.959,00</b>	<b>8.505.730.909,00</b>
b	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.638.130.959,00	5.519.940.959,00	6.243.334.000,00	2.985.789.950,00	11.881.464.959,00	8.505.730.909,00
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.455.362.003,00</b>	<b>6.048.870.832,69</b>	<b>12.321.334.150,00</b>	<b>11.995.246.027,00</b>	<b>18.776.696.153,00</b>	<b>18.044.116.859,69</b>
a	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	6.455.362.003,00	6.048.870.832,69	12.321.334.150,00	11.995.246.027,00	18.776.696.153,00	18.044.116.859,69
<b>14</b>	<b>Statistik</b>	-	-	-	-	-	-
a	Dinas Komunikasi dan Informatika						
<b>15</b>	<b>Persandian</b>	-	-	<b>94.050.000,00</b>	<b>94.050.000,00</b>	<b>94.050.000,00</b>	<b>94.050.000,00</b>
a	Dinas Komunikasi dan Informatika			94.050.000,00	94.050.000,00	94.050.000,00	94.050.000,00
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>6.907.592.000,00</b>	<b>6.444.143.859,00</b>	<b>7.747.383.000,00</b>	<b>8.752.494.275,00</b>	<b>14.654.975.000,00</b>	<b>15.196.638.134,00</b>
a	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.907.592.000,00	6.444.143.859,00	7.747.383.000,00	8.752.494.275,00	14.654.975.000,00	15.196.638.134,00
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>	-	-	<b>1.339.491.950,00</b>	<b>1.339.491.950,00</b>	<b>1.339.491.950,00</b>	<b>1.339.491.950,00</b>
a	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			1.339.491.950,00	1.339.491.950,00	1.339.491.950,00	1.339.491.950,00
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>6.407.482.913,60</b>	<b>6.511.585.917,42</b>	<b>9.114.899.700,00</b>	<b>4.356.235.700,00</b>	<b>15.522.382.613,60</b>	<b>10.867.821.617,42</b>
a	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.407.482.913,60	6.511.585.917,42	9.114.899.700,00	4.356.235.700,00	15.522.382.613,60	10.867.821.617,42



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG		JUMLAH (BTL+BL)	
		APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>C</b>	<b>Urusan Pemerintah Pilihan</b>	<b>78.483.280.055,69</b>	<b>71.529.138.537,50</b>	<b>77.377.312.150,00</b>	<b>102.472.735.231,00</b>	<b>155.860.592.205,69</b>	<b>174.001.873.768,50</b>
1	Kelautan dan Perikanan	14.534.150.687,00	13.381.866.651,00	16.778.829.000,00	17.570.568.600,00	31.312.979.687,00	30.952.435.251,00
a	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.534.150.687,00	13.381.866.651,00	16.778.829.000,00	17.570.568.600,00	31.312.979.687,00	30.952.435.251,00
2	Pariwisata	-	-	4.546.403.000,00	6.931.327.825,00	4.546.403.000,00	6.931.327.825,00
a	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	4.546.403.000,00	6.931.327.825,00	4.546.403.000,00	6.931.327.825,00
3	Pertanian	19.960.618.966,28	15.651.816.398,50	23.892.167.950,00	25.293.320.750,00	43.852.786.916,28	40.945.137.148,50
a	Dinas Pertanian	19.960.618.966,28	15.651.816.398,50	23.892.167.950,00	25.293.320.750,00	43.852.786.916,28	40.945.137.148,50
4	Kehutanan	18.411.704.640,00	17.655.472.721,00	10.190.980.000,00	9.392.266.000,00	28.602.684.640,00	27.047.738.721,00
a	Dinas Kehutanan	18.411.704.640,00	17.655.472.721,00	10.190.980.000,00	9.392.266.000,00	28.602.684.640,00	27.047.738.721,00
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	13.399.319.769,00	14.199.869.303,00	10.211.061.000,00	9.987.028.000,00	23.610.380.769,00	24.186.897.303,00
a	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.399.319.769,00	14.199.869.303,00	10.211.061.000,00	9.987.028.000,00	23.610.380.769,00	24.186.897.303,00
6	Perdagangan	-	-	4.667.242.000,00	26.650.543.556,00	4.667.242.000,00	26.650.543.556,00
a	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	4.667.242.000,00	26.650.543.556,00	4.667.242.000,00	26.650.543.556,00
7	Perindustrian	12.177.485.993,41	10.640.113.464,00	6.620.141.700,00	6.324.427.000,00	18.797.627.693,41	16.964.540.464,00
a	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.177.485.993,41	10.640.113.464,00	6.620.141.700,00	6.324.427.000,00	18.797.627.693,41	16.964.540.464,00
8	Transmigrasi	-	-	470.487.500,00	323.253.500,00	470.487.500,00	323.253.500,00
a	Dinas Tenaga Kerja	-	-	470.487.500,00	323.253.500,00	470.487.500,00	323.253.500,00
<b>D</b>	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>948.307.054.803,26</b>	<b>913.412.012.856,13</b>	<b>226.667.872.602,00</b>	<b>248.168.104.994,00</b>	<b>1.174.974.927.405,26</b>	<b>1.161.580.117.850,13</b>
1	Fungsi Penunjang	10.345.890.410,00	8.718.665.272,08	14.817.153.756,00	15.280.890.579,00	25.163.044.166,00	23.999.555.851,08



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG		JUMLAH (BTL+BL)	
		APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Perencanaan</b>						
a	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	10.345.890.410,00	8.718.665.272,08	13.618.512.000,00	13.790.838.900,00	23.964.402.410,00	22.509.504.172,08
c	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)	-	-	1.198.641.756,00	1.490.051.679,00	1.198.641.756,00	1.490.051.679,00
<b>2</b>	<b>Fungsi Penunjang Keuangan</b>	<b>826.794.130.296,11</b>	<b>798.213.983.300,05</b>	<b>24.675.698.261,00</b>	<b>22.915.072.000,00</b>	<b>851.469.828.557,11</b>	<b>821.129.055.300,05</b>
a	Badan Keuangan Daerah	826.794.130.296,11	798.213.983.300,05	24.675.698.261,00	22.915.072.000,00	851.469.828.557,11	821.129.055.300,05
	1) Belanja SKPD	47.626.786.784,45	47.620.772.349,45	24.675.698.261,00	22.915.072.000,00	72.302.485.045,45	70.535.844.349,45
	2) Belanja PPKD	779.167.343.511,66	756.410.318.950,60			779.167.343.511,66	756.410.318.950,60
<b>3</b>	<b>Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>19.416.589.902,00</b>	<b>12.173.463.253,00</b>	<b>19.485.584.400,00</b>	<b>18.012.681.740,00</b>	<b>38.902.174.302,00</b>	<b>30.186.144.993,00</b>
a	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.416.589.902,00	12.173.463.253,00	19.485.584.400,00	18.012.681.740,00	38.902.174.302,00	30.186.144.993,00
<b>4</b>	<b>Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan</b>	-	-	<b>640.420.000,00</b>	<b>548.023.000,00</b>	<b>640.420.000,00</b>	<b>548.023.000,00</b>
a	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	-	-	640.420.000,00	548.023.000,00	640.420.000,00	548.023.000,00
<b>4</b>	<b>Fungsi Penunjang Pengawasan</b>	<b>12.145.426.685,00</b>	<b>11.276.935.494,00</b>	<b>8.653.899.200,00</b>	<b>7.796.354.450,00</b>	<b>20.799.325.885,00</b>	<b>19.073.289.944,00</b>
a	Inspektorat	12.145.426.685,00	11.276.935.494,00	8.653.899.200,00	7.796.354.450,00	20.799.325.885,00	19.073.289.944,00
<b>5</b>	<b>Fungsi Penunjang Kesekretariatan Daerah</b>	<b>79.605.017.510,15</b>	<b>83.028.965.537,00</b>	<b>158.395.116.985,00</b>	<b>183.615.083.225,00</b>	<b>238.000.134.495,15</b>	<b>266.644.048.762,00</b>



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG		JUMLAH (BTL+BL)	
		APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017	APBD 2017	PPAS-P 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>dan Kesekretariatan DPRD</b>						
a	Sekretariat Daerah	47.393.812.480,00	44.824.152.380,00	71.203.021.285,00	84.604.427.555,00	118.596.833.765,00	129.428.579.935,00
b	Sekretariat DPRD	8.762.621.635,00	7.879.580.517,00	77.390.742.700,00	89.706.199.370,00	86.153.364.335,00	97.585.779.887,00
e	Badan Penghubung Provinsi	4.215.050.455,15	3.363.699.700,00	9.801.353.000,00	9.304.456.300,00	14.016.403.455,15	12.668.156.000,00
c	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.982.754.287,00	25.122.297.587,00			17.982.754.287,00	25.122.297.587,00
d	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.250.778.653,00	1.250.778.653,00			1.250.778.653,00	1.250.778.653,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.489.821.437.602,11</b>	<b>1.426.029.877.299,96</b>	<b>1.176.302.017.342,00</b>	<b>1.220.520.155.935,26</b>	<b>2.666.123.454.944,11</b>	<b>2.646.550.033.235,22</b>





#### **4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah (PD) dan Program/Kegiatan Prioritas Per PD**

Perubahan Plafon Anggaran Sementara PD dan program/kegiatan per PD tahun anggaran 2017 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel IV.2 berikut:



**Tabel IV.2**  
**Perubahan Plafon Anggaran Sementara**  
**Berdasarkan PD Tahun 2017**

NO.	PERANGKAT DAERAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG		JUMLAH (BTL+BL)	
		APBD 2017	PPAS P 2017 new	APBD 2017	PPAS P 2017 new	APBD 2017	PPAS P 2017 new
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas Pendidikan	254.713.895.218,95	237.826.631.204,63	195.705.086.500,00	239.536.757.900,00	450.418.981.718,95	477.363.389.104,63
2	Dinas Kesehatan	13.759.247.062,00	13.080.362.278,00	37.328.632.300,00	34.992.002.337,00	51.087.879.362,00	48.072.364.615,00
3	RSUP	28.299.527.620,00	29.436.148.310,00	110.821.800.950,00	112.163.469.260,00	139.121.328.570,00	141.599.617.570,00
4	RSJ	28.121.492.673,90	25.604.392.888,90	33.155.244.500,00	29.584.136.450,00	61.276.737.173,90	55.188.529.338,90
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.316.988.313,00	16.827.663.633,00	305.390.654.700,00	286.351.070.431,00	321.707.643.013,00	303.178.734.064,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.915.098.000,00	5.120.030.554,52	12.481.785.000,00	10.139.790.000,00	18.396.883.000,00	15.259.820.554,52
7	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	10.345.890.410,00	8.718.665.272,08	14.258.932.000,00	14.338.861.900,00	24.604.822.410,00	23.057.527.172,08
8	Dinas Perhubungan	6.533.360.754,00	6.213.740.489,00	30.420.489.000,00	24.986.315.363,26	36.953.849.754,00	31.200.055.852,26
9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	7.628.699.044,00	7.431.859.812,00	5.234.690.250,00	5.425.052.250,00	12.863.389.294,00	12.856.912.062,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil	6.141.827.458,00	5.515.485.443,00	7.163.548.000,00	6.244.283.400,00	13.305.375.458,00	11.759.768.843,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.585.514.373,00	4.203.466.361,00	11.237.045.800,00	8.395.606.800,00	15.822.560.173,00	12.599.073.161,00
12	Dinas Sosial	10.061.116.560,00	9.399.170.974,92	14.248.804.450,00	12.277.483.737,00	24.309.921.010,00	21.676.654.711,92
13	Dinas Tenaga Kerja	15.762.254.200,00	13.788.514.087,00	10.782.068.900,00	9.843.048.300,00	26.544.323.100,00	23.631.562.387,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.837.517.611,85	5.748.138.864,00	7.760.720.600,00	8.143.084.600,00	13.598.238.211,85	13.891.223.464,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.638.130.959,00	5.519.940.959,00	6.243.334.000,00	2.985.789.950,00	11.881.464.959,00	8.505.730.909,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.907.592.000,00	6.444.143.859,00	12.293.786.000,00	15.683.822.100,00	19.201.378.000,00	22.127.965.959,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.455.362.003,00	6.048.870.832,69	12.321.334.150,00	11.995.246.027,00	18.776.696.153,00	18.044.116.859,69
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.475.416.309,97	5.036.794.397,11	5.357.828.730,00	4.570.291.630,00	10.833.245.039,97	9.607.086.027,11
19	Satuan Polisi Pamong Praja	10.010.062.054,00	9.545.424.054,00	13.295.833.960,00	12.014.873.550,00	23.305.896.014,00	21.560.297.604,00



NO.	PERANGKAT DAERAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG		JUMLAH (BTL+BL)	
		APBD 2017	PPAS P 2017 new	APBD 2017	PPAS P 2017 new	APBD 2017	PPAS P 2017 new
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Sekretariat Daerah	47.393.812.480,00	44.824.152.380,00	72.735.753.041,00	86.428.569.234,00	120.129.565.521,00	131.252.721.614,00
21	Sekretariat DPRD	8.762.621.635,00	7.879.580.517,00	77.390.742.700,00	89.706.199.370,00	86.153.364.335,00	97.585.779.887,00
22	DPRD	17.982.754.287,00	25.122.297.587,00			17.982.754.287,00	25.122.297.587,00
23	Kepala Daerah	1.250.778.653,00	1.250.778.653,00			1.250.778.653,00	1.250.778.653,00
22	Badan Keuangan Daerah	47.626.786.784,45	47.620.772.349,45	24.675.698.261,00	22.915.072.000,00	72.302.485.045,45	70.535.844.349,45
23	Inspektorat Daerah	12.145.426.685,00	11.276.935.494,00	8.653.899.200,00	7.796.354.450,00	20.799.325.885,00	19.073.289.944,00
24	Badan Penghubung Provinsi	4.215.050.455,15	3.363.699.700,00	9.801.353.000,00	9.304.456.300,00	14.016.403.455,15	12.668.156.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.416.589.902,00	12.173.463.253,00	19.485.584.400,00	18.012.681.740,00	38.902.174.302,00	30.186.144.993,00
26	Dinas Pangan	5.011.385.318,34	4.480.245.312,14	5.062.044.000,00	4.992.738.400,00	10.073.429.318,34	9.472.983.712,14
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	6.869.770.039,55	5.440.309.318,00	20.651.352.850,00	21.068.504.100,00	27.521.122.889,55	26.508.813.418,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.579.362.257,00	6.637.155.057,00	9.529.156.800,00	9.710.712.800,00	16.108.519.057,00	16.347.867.857,00
29	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.407.482.913,60	6.511.585.917,42	10.454.391.650,00	5.695.727.650,00	16.861.874.563,60	12.207.313.567,42
30	Dinas Pertanian	19.960.618.966,28	15.651.816.398,50	23.892.167.950,00	25.293.320.750,00	43.852.786.916,28	40.945.137.148,50
31	Dinas Kehutanan	18.411.704.640,00	17.655.472.721,00	10.190.980.000,00	9.392.266.000,00	28.602.684.640,00	27.047.738.721,00
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.399.319.769,00	14.199.869.303,00	10.211.061.000,00	9.987.028.000,00	23.610.380.769,00	24.186.897.303,00
33	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.534.150.687,00	13.381.866.651,00	16.778.829.000,00	17.570.568.600,00	31.312.979.687,00	30.952.435.251,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.177.485.993,41	10.640.113.464,00	11.287.383.700,00	32.974.970.556,00	23.464.869.693,41	43.615.084.020,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>710.654.094.090,45</b>	<b>669.619.558.349,36</b>	<b>1.176.302.017.342,00</b>	<b>1.220.520.155.935,26</b>	<b>1.886.956.111.432,45</b>	<b>1.890.139.714.284,62</b>



#### **4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan**

Sementara itu, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan program kegiatan PD adalah sebagaimana yang disajikan di dalam Lampiran Dokumen PPAS ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen PPAS Perubahan ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Tahun Anggaran 2017 ini disusun dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun 2017.

Pangkalpinang, Agustus 2017

**GUBERNUR**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**ERZALDI ROESMAN**